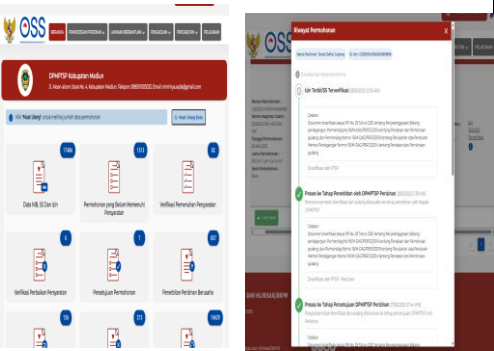
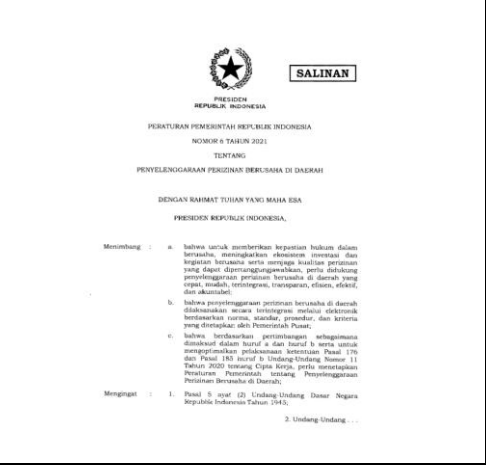
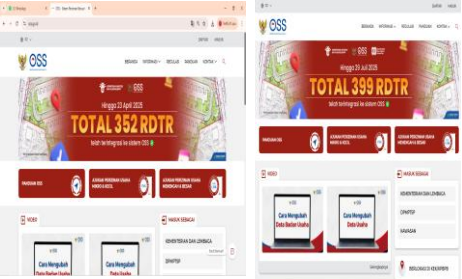
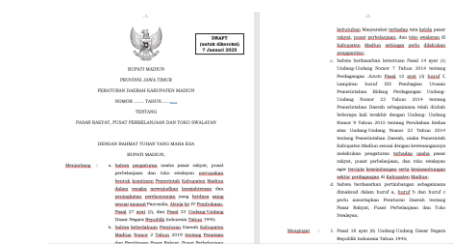


TINDAK LANJUT HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK
TAHUN 2024

Tautan Data Dukung :
<https://drive.google.com/drive/folders/1kSo6ul48YEFEBuh2SPPDs8S0ZOI8j81-?usp=sharing>

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI MASALAH	ANALISIS	RENCANA AKSI	TINDAK LANJUT		
					WAKTU	PENJELASAN	BUKTI DUKUNG
1	DPMPTSP Kab. Madiun	a. Kesulitan mendapatkan informasi dalam persyaratan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)	a. Pesyaratan pengurusan LSD tersebut perlu dipublikasikan ulang melalui website/media sosial	a. Publikasi atas persyaratan LSD akan dilakukan melalui website/media sosial.	1 bulan	selesai ditindaklanjuti	
		b. Penempatan petugas loket layanan yang kompeten	b. Kebutuhan atas kompetensi petugas loket layanan perlu dipertimbangkan OPD/instansi terkait	b. Penyampaian surat edaran atas kebutuhan kompetensi petugas layanan kepada OPD/instansi terkait.	Maret 2025	selesai ditindaklanjuti	

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI MASALAH	ANALISIS	RENCANA AKSI	TINDAK LANJUT		
					WAKTU	PENJELASAN	BUKTI DUKUNG
		c. Percepatan dalam pembayaran/pengurangan BPHTB dan validasi - verifikasi terhadap layanan BPHTB	c. Berdasarkan konfirmasi dari Bapenda Kab. Madiun dilakukan survei lapangan terhadap objek pajak terlebih dahulu	c. Bersurat ke Bapenda untuk konfirmasi terkait tahapan validasi-verifikasi dilakukan dengan survei lapangan terhadap objek pajak terlebih dahulu.	4 November 2024	selesai ditindaklanjuti	
		d. Notifikasi batasan waktu dalam tahapan verifikasi dalam aplikasi OSS RBA, mengingat telah ada sistem tersebut di ATR/BNP	d. Aplikasi OSS RBA masih dalam tahap perbaikan secara berkesinambungan oleh Pusat.	d. Aplikasi OSS RBA masih dalam tahap perbaikan/pengembangan secara berkesinambungan.	sesuai sistem oss	selesai ditindaklanjuti	
		e. Perlunya DPMPTSP dalam proses perizinan berusaha memiliki otoritas lebih sehingga pelayanan lebih cepat.	e. Sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2021, semua perizinan berusaha dan perizinan non berusaha telah dilim	e. Pendelegasian/pelimpahan atas semua perizinan berusaha dan perizinan non berusaha ke DPMPTSP, namun dalam prosesnya masih membutuhkan koordinasi/rekomendasi dari OPD teknis.	PP 6 Tahun 2021 terbit 2 Februari 2021	selesai ditindaklanjuti	

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI MASALAH	ANALISIS	RENCANA AKSI	TINDAK LANJUT		
					WAKTU	PENJELASAN	BUKTI DUKUNG
		f. Perlunya aplikasi RTRW Online di Kabupaten Madiun sehingga membantu kemudahan bagi pelaku usaha/pengembang	f. Saat ini pada Dinas dilaksanakan reviu RTRW, terkait dengan RTRW Online akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR.	f. Dinas PUPR akan melakukan reviu RTRW dan terkait RTRW Online akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR.	April 2025	selesai ditindaklanjuti	
		g. Layanan SLF untuk dibedakan/diklasifikasikan berdasarkan usaha besar, kecil, mikro dan menengah	g. Pembedaan/klasifikasi berdasarkan usaha besar, kecil, mikro dan menengah akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR.	g. Berkoordinasi/bersurat ke Dinas PUPR terkait klasifikasi atas layanan SLF tersebut.	5 November 2024	selesai ditindaklanjuti	
		h. Pendirian toko modern berjaringan (Alfamart/Indomart) di Kab. Madiun yang dibatasi mulai tahun 2018.	h. Jumlah toko berjaringan di wilayah Kab. Madiun berjumlah 73 toko tersebar di 13 Kecamatan kecuali Kecamatan Kare dan Kecamatan Gemarang. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi toko kelontong dan pasar tradisional. Pada Dinas Perdagkop & UM saat ini menyusun Perda yang mengatur toko modern berjaringan.	h. Tengah disusun Perda yang mengatur toko modern berjaringan.	7 Januari 2025 - saat ini masih proses	masih proses penyusunan Raperda	
		i. Pengajuan Perizinan Berusaha dalam rangka menurunkan besaran pembayaran tarif listrik (R1 menjadi Bisnis) belum terbit.	i. Untuk penurunan biaya listrik dengan melampirkan NIB. Adapun pendaftaran NIB tersebut dengan menggunakan NIK dan HP/Email aktif pemohon.	i. Melampirkan NIB, jika belum memiliki perlu melakukan pendaftaran dengan menggunakan NIK, email aktif, HP/WA.	18 Desember 2024	sudah ditindaklanjuti	

